URGENSI PENGATURAN ACARA PENYITAAN UNTUK PEMULIHAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG KUP

SKRIPSI

Oleh :

STEVANUS HERDI PARDAMAIAN ARUAN
2240057023

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025

URGENSI PENGATURAN ACARA PENYITAAN UNTUK PEMULIHAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG KUP

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

STEVANUS HERDI PARDAMAIAN ARUAN
2240057023

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025

VISI MISI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi :

Menjadi Fakultas Hukum Unggulan di kawasan Asia pada tahun 2034 di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi :

1. Mempersiapkan "sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lain.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama	:	Stevanus Herdi Pardamaian Aruan
NIM	:	2240057023
Program Studi	:	Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "**Urgensi Pengaturan Acara Penyitaan untuk Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara dalam Undang- Undang KUP**" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 03 Februari 2025

METERAI TEMPEL
10000
6097FAMX258707341

Stevanus Herdi Pardamaian Aruan
NIM : 2240057023

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh

Nama	: Stevanus Herdi Pardamaian Aruan
NIM	: 2240057023
Program Studi	: Hukum
Peminatan/Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul	: Urgensi Pengaturan Acara Penyitaan untuk Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara dalam Undang-Undang KUP

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 03 Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	**Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.**
NIDN 0020096802	NIDN 0302117904

Ketua Program Studi Hukum	Dekan
Dr. Rr Ani Wijayati, S.H., M.Hum.	**Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.**
NIDN 0327046303	NIDN 0302117904

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 3 Februari 20253 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama	:	Stevanus Herdi Pardamaian Aruan
NIM	:	2240057023
Program Studi	:	Hukum
Fakultas	:	Hukum
Judul	:	Urgensi Pengaturan Acara Penyitaan untuk Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara dalam Undang-Undang KUP

oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	**Jabatan dalam Tim Penguji**	**Tanda Tangan**
Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Ketua	
Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Anggota	
Andree Washington, S.H., M.H.	Anggota	

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Halaman Pengesahan

Urgensi Pengaturan Acara Penyitaan untuk Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara dalam Undang- Undang KUP

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama	: Stevanus Herdi Pardamaian Aruan
NIM	: 2240057023
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Telah Diperiksa di depan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 3 Februari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat :

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Anggota Tim Penguji

Andree Washington Hasiholan, S.H., M.H.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama	:	Stevanus Herdi Pardamaian Aruan
NIM	:	2040057023
Program Studi	:	Hukum
Jenis Tugas Akhir	:	Skripsi
Fakultas	:	Hukum
Judul Skripsi	:	"**Urgensi Pengaturan Acara Penyitaan untuk Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara dalam Undang-Undang KUP"**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, pada tanggal 03 Februari 2025

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

Stevanus Herdi Pardamaian Aruan
NIM : 2240057023

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul "**Urgensi Pengaturan Acara Penyitaan untuk Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara dalam Undang-Undang KUP**"

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar kesarjanaan Strata-1 (S1) di bidang Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Indonesia (UKI). Di dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku wakil rektor akademik Universitas Kristen Indonesia dan Dosen Pembimbing I yang memberikan petunjuk, masukan dan bimbingan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Dosen Pembimbing II yang memberikan petunjuk, masukan dan bimbingan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Radisman Saragih, S.H., M.H, selaku dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum.

6. Para Pembantu Dekan, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh kuliah, serta seluruh jajaran Fakultas.
7. Istriku tercinta Lita Murni Silalahi, S.E.,Ak., M.Acc., anakku terkasih Laurensius Dextraldi, S.Hub.Int., yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis, serta adik-adikku Dra. Maria Ariani Aruan, S,H., M.H., Elizabeth Novi Aruan, S.H, Natalia R. Aruan, S.E., M.Si., Dr. Albert Richi Aruan, S.H., LL.M., M.Kn.
8. Sahabat-sahabatku, Aris Hidayat, S.Mn., M.Si., Ahsan Fahmi Ula, S.E., Ak., M.M., yang bersama-sama saling menyemangati dari awal perkuliahan sampai selesainya perkuliahan ini.
9. Rekan-rekanku seperjuangan kelas Karyawan FH UKI dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kolega, keluarga besar penulis yang selalu memberi support dalam penyelesaian perkuliahan ini

Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima komentar dan masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara di kemudian hari.

Jakarta, 03 Februari 2025
Penulis,

Stevanus Herdi P. Aruan
2240057023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …….. i
VISI MISI …… ii
HALAMAN KEASLIAN …… iii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING……. iv
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI……. v
HALAMAN PENGESAHAN…….. vi
HALAMAN PUBLIKASI …….. vii
KATA PENGANTAR……. viii
DAFTAR ISI……..….. x
ABSTRAK……xiii
ABSTRACT…….… xv
BAB I PENDAHULUAN……..…… 1
A. Latar Belakang Masalah…….…… 1
B. Perumusan Masalah…….…….…… 8
C. Ruang Lingkup Penelitian…….…… 9
D. Maksud Dan Tujuan Penelitian…….. 9
E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konsep…….. 9
1. Kerangka Teoritis…….. 9
2. Kerangka Konsep…….. 12
F. Metode Penelitian……15
1. Jenis Penelitian…….. 15
2. Pendekatan Penelitian…… 16
3. Jenis Data……... 16
4. Teknik Pengumpulan Data…… 17
5. Analisis Data…… 17
G. Sistematika Penelitian…… 18
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN…… 20
A. TINJAUAN MENGENAI TEORI-TEORI…….…….. 20
1. Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto…… 20

2. Teori Keadilan Hukum Menurut Hans Kelsen……. 24
B. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERPAJAKAN…….. 31
C. TINJAUAN TENTANG PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN……...38
1. Pengertian Penyidikan…… 38
2. Pengertian Penyidik……39
D. TINJAUAN TENTANG PENYITAAN…….…… 42
1. Pengertian Penyitaan…….. 42
2. Fungsi Penyitaan…… 48
3. Tujuan Penyitaan…… 49
4. Ketentuan Penyitaan…….. 49
E. TINJAUAN TENTANG KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK……..... 52
F. TINJAUAN TENTANG DASAR HUKUM PENGEMBALIAN ASSET……..…….. 54
G. PEMULIHAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA…….. 56
BAB III PENGATURAN PENYITAAN OLEH PPNS DJP MENURUT PASAL 44 AYAT (2) HURUF J UU KUP DALAM MEMULIHKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA ……...58
A. PENGATURAN MENGENAI KEWENANGAN OLEH PPNS DJP MENURUT PASAL 44 AYAT (2) HURUF J UU KUP……58
1. Kewenangan Pemblokiran……. 58
2. Kewenangan Penyitaan…..……. 61
3. Ketentuan Penyitaan Menurut KUHP…… 65
4. Perbandingan Kewenangan Pemblokiran dan Penyitaan oleh PPNS DJP Berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) Huruf j UU KUP dengan Ketentuan KUHP……..... 67
B. TUJUAN PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA……..……. 70
C. PENGATURAN PENYITAAN OLEH PPNS DJP MENURUT PASAL 44 AYAT (2) HURUF J UU KUP DALAM

MEMULIHKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA BERDASARKAN TEORI PENEGAKAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO…… 72
D. KETENTUAN PENYITAAN DALAM PENAGIHAN PAJAK …… 75
BAB IV PENGATURAN ACARA PENYITAAN PAJAK YANG IDEAL UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEROLEHAN PADA PENDAPATAN NEGARA……... 79
A. TATA CARA PENYITAAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG KUP…….. 81
B. ANALISIS TENTANG TATA CARA PENYITAAN MENURUT UU KUP…… 85
C. TATA CARA PENYITAAN IDEAL OLEH PPNS PAJAK/DJP UNTUK PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN HUKUM MENURUT HANS KELSEN…….. 89
BAB V PENUTUP…… 93
A. KESIMPULAN……. 93
B. SARAN……. 94
DAFTAR PUSTAKA……. 96

ABSTRAK

A. Nama : Stevanus Herdi Pardamaian Aruan
B. NIM : 2240057023
C. Program Kekhususan/ Departemen : Hukum / Hukum Pidana
D. Judul : Urgensi Pengaturan Acara Penyitaan Untuk Pemulihan Kerugian Pada Pendapatan Negara Dalam Undang-Undang KUP.
E. Halaman : i-xiv, 99 Halaman + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : penyitaan, pemulihan kerugian negara, UU KUP, penegakan hukum perpajakan, kepastian hukum
G. Ringkasan Isi :

Penelitian ini membahas urgensi pengaturan acara penyitaan dalam pemulihan kerugian pendapatan negara berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam sistem perpajakan Indonesia, penyitaan aset Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan merupakan salah satu langkah penegakan hukum guna memastikan pembayaran pajak yang terutang. Namun, hingga saat ini, mekanisme penyitaan dalam konteks perpajakan belum memiliki pengaturan yang komprehensif dan tegas dalam UU KUP, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kendala dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat pelanggaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlunya pengaturan khusus mengenai prosedur penyitaan dalam hukum perpajakan serta dampaknya terhadap efektivitas pemulihan kerugian negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum yang mengatur penyitaan dalam berbagai regulasi, termasuk hukum perpajakan dan hukum acara pidana, untuk menilai kesesuaian dan kekurangan dalam UU KUP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan acara penyitaan yang rinci dalam UU KUP dapat menghambat proses pemulihan kerugian negara karena tidak adanya pedoman yang jelas mengenai tahapan, pihak yang berwenang, serta perlindungan hukum bagi Wajib Pajak yang dikenai tindakan penyitaan. Selain itu, perbandingan dengan sistem perpajakan di beberapa negara lain menunjukkan bahwa regulasi yang lebih sistematis dan tegas mengenai penyitaan dapat meningkatkan kepastian hukum serta efektivitas dalam penegakan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pengaturan yang lebih jelas dan terperinci mengenai prosedur penyitaan dalam UU KUP sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara akibat pelanggaran pajak. Regulasi yang lebih tegas dapat memperkuat otoritas fiskus dalam menindak pelanggaran pajak tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi Wajib Pajak. Oleh karena itu, pembentukan aturan khusus dalam UU KUP mengenai mekanisme penyitaan, baik dari segi prosedural maupun kelembagaan, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak Wajib Pajak.

H. Daftar Acuan : 32 buku, 10 peraturan perundang-undangan, 8 jurnal/artikel

I. Dosen Pembimbing I : Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II: Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Jakarta, 03 Februari 2025
Penulis,

Stevanus Herdi Pardamaian Aruan
2240057023

ABSTRACT

A. *Name* : Stevanus Herdi Pardamaian Aruan
B. NIM : 2240057023
C. *Specific Program* : *Public Law*
D. *Title* : "Urgensi Pengaturan Acara Penyitaan Untuk Pemulihan Kerugian Pada Pendapatan Negara Dalam Undang- Undang KUP"
E. *Keyword* : *seizure, state revenue recovery, UU KUP, tax law enforcement, legal certainty..*
F. *Page* : 99 (*numeric*) + i-xiii (*roman*) *pages*
G. *Summary* :

This study examines the urgency of regulating seizure procedures for recovering state revenue losses under the General Provisions and Tax Procedures Law (UU KUP). *In Indonesia's taxation system, the seizure of taxpayer assets due to tax violations is a legal enforcement measure to ensure tax obligations are met. However, the current* UU KUP *lacks comprehensive and explicit provisions on seizure procedures, potentially causing legal uncertainty and obstacles in recovering state losses from tax violations. Therefore, this study aims to analyze the necessity of specific regulations governing seizure procedures in tax law and their impact on the effectiveness of state revenue recovery.*

This research employs a normative legal approach by analyzing legislation and conceptual frameworks. The study examines existing seizure regulations within tax law and criminal procedural law to assess the adequacy and shortcomings of the UU KUP. *Findings indicate that the absence of detailed seizure procedures in the* UU KUP *hinders the recovery of state losses due to unclear guidelines regarding the stages, authorities, and legal protection for taxpayers subject to seizure. Additionally, a comparative analysis with tax systems in other countries suggests that a more structured and explicit legal framework on seizure can enhance legal certainty and the effectiveness of tax enforcement.*

The study concludes that a clearer and more detailed legal framework on seizure procedures in the UU KUP *is essential to optimize the recovery of state losses from tax violations. Strengthened regulations can enhance the authority of tax authorities in enforcing compliance while ensuring fairness for taxpayers. Therefore, establishing specific legal provisions in the* UU KUP *regarding seizure mechanisms—both procedurally and institutionally—is a strategic step to improve tax enforcement effectiveness while balancing legal certainty and taxpayer rights.*

H.	*Reference*	: 32 *books*, 10 *legislations*, 8 *journals/articles*
I.	*Thesis Advisor* I	: Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
	Thesis Advisor II	: Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Jakarta, *February* 3rd, 2025
Writer,

Stevanus Herdi Pardamaian Aruan
2240057023

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 1953
MELAYANI, BUKAN DILAYANI